



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Subhana Wata'ala atas tersusunya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Renja ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja ini memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta yang terpenting adalah memuat mengenai evaluasi, analisis kinerja, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Tenggarong, Maret 2020

Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Jl. Muso Bin Salim No. 06 Telp (0541) 661122 Fax (0541) 664881
Website: <http://pertaru.kukarkab.go.id> Email: dppr@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NOMOR : 078/188.4/SK.PA/Renja/III/2020

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka RENJA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang;

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021.

Pasal I

Rencana kerja Dinas pertanahan dan penataan ruang kabupaten kutai kartanegara tahun 2021, selanjutnya disebut dengan RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020

Ditetapkan di Tenggarong, Maret 2020
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara


SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Urusan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan	5
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	37
3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
4.1 Program dan Kegiatan	40
BAB V PENUTUP.....	40
LAMPIRAN TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PERANGKAT DAERAH memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja 2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Renstra Perubahan 2016-2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang harus terintegrasi dengan prioritas dan focus pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ini memuat usulan-usulan kegiatan tahun 2020 dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat.

Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi rancangan Renja perangkat daerah didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2020.

Mengingat sumber daya yang terbatas maka usulan-usulan dalam rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas

*RENCANA Kerja Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara*

dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu penentuan kegiatan 2021 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi 2020 dan evaluasi tahun 2019. Usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilih ke dalam beberapa *skala prioritas* yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pertanahan dan Penataan Ruang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
- m. Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara mengaju kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA URUSAN PERTANAHAN DAN URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA URUSAN TATA RUANG DAN URUSAN PERTANAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) urusan Pertanahan dan urusan penataan ruang tahun 2019 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra urusan Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SD TAHUN 2019

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2016-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	
			Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100	97.9	97.57	100		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Listrik,Air,Telepon dan Internet	300 Rekening	60 rekening	60 rekening	100	60 Rekening	60 Rekening	100 %

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

	(Rekening)							
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola administrasi keuangan	3300 OB	660 OB	660 OB	100	660 OB	660 OB	100 %
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Jenis	1 Paket	1 Paket	100	56 Jenis	56 Jenis	100 %
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	1 unit	1 unit	100	19 unit	19 unit	100 %
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan	48.000 kotak	100 Kotak	100 Kotak	100	100 Kotak	100 Kotak	100 %

	Minuman untuk Rapat dan Tamu							
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3300 OB	660 OB	660 OB	100	660 OB	660 OB	100 %

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	1 Paket	1 Paket	100	3 Jenis	3 Jenis	100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150 kali	12 Kali	10 Kali	83	12 kali	12 kali	100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana								

Aparatur								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (unit)		1 unit	1 unit	100	-	-	100 %
Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah unit	10 Unit	-	-	-	4 unit	4 unit	100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	100%	100%	100%			100%
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Jumlah kewajiban yang terbayarkan	-	3 Kegiatan	3 kegiatan	100 %	-	-	100 %
Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah Jenis Data/Publikasi		-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	-
Penyusunan dokumen perencanaan dan lapora	Jumlah dokumen	45 Dok	-	-	-	9	9 Dokumen	-

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

kinerja serta monitoring dan evaluasi	perencanaan dan laporan kinerja SKPD					Dokumen		
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan, Desa/Kelurahan	Jumlah SKPT	90	546 SKPT	546 SKPT	100%	-	-	100%
Fasilitasi Sertifikasi Lahan Perumahan	Jumlah Sertifikat	-	100 Persil	88 Persil	69.57 %	-	-	-
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sertifikat	1780 persil	64 Persil	57 Persil	95.05%	413 persil	413 persil	100%
Pembebasan lahan Pasar Mangkurawang Tahap II	Jumlah luas lahan yang	-	-	-	-	3.50 Ha	3.50 Ha	100%

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

	dibebaskan							
Peningkatan Legalitas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Persil	-	-	-	-	250 persil	250 persil	100%
Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah Kecamatan	-	-	-	-	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100%

Pengadaan Lahan di Kecamatan Marang Kayu	Jumlah luas lahan yang dibebaskan	-	-	-	-	2 Ha	2 Ha	100%
Pembebasan lahan institut Seni budaya Indonesia	Jumlah luas lahan yang dibebaskan	-	28 Ha	1.1 Ha	3.9 %	-	-	-
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		100%		100%	100%			100%

Facilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah Kasus yang diselesaikan	175 kasus	12 kasus	12 kasus	100 %	13 kasus	13 kasus	100 %
Program Perencanaan Tata Ruang		100 %						
Persetujuan Substansi dan kelengkapan pendukung revisi Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
Penyusunan Materi Teknis RDTR Kecamatan Loa Kulu	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %

Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Muara Badak dan Marangkayu	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Samboja dan Loa Janan	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %

Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Sanga-sanga dan Anggana	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %
--	----------------	-------	---	---	---	-------	-------	-------

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Sebulu dan Muara Kaman	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Muara Wis dan Muara Muntai	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	-	-	2 Dok	1 Dok	50 %
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Kota Bangun	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-			100 %
Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %
Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan	Jumlah	1 Dok	-	-	-	2 Dok	2 Dok	100 %

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Muara Jawa	Dokumen							
Program Pemanfaatan Ruang		100%						100 %
Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Utilitas Terpadu Kota Tenggara	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100 %
Kajian Pemukiman Di atas Air Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100 %
Update Tata Guna Lahan	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	-	-	-	-	-

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikelompokkan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan KLHS Koreksi perpetaan dan kelengkapan Substansi RDTR Wilayah perkotaan Kota Bangun

Kegiatan ini dengan total anggaran Rp 1.300.000.000,00,-, tidak terealisasi dikarenakan Gagal Lelang karena kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi yang dilakukan oleh pokja pemilihan.

2. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Kajian Pemukiman Diatas Air kabupaten Kutai Kartanegara

Kegiatan ini dengan total anggaran Rp 1.100.000.000,00,-, tidak terealisasi juga dikarenakan Gagal Lelang karena kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi yang dilakukan oleh pokja pemilihan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran****a. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran**

Kegiatan ini dengan anggaran Rp 2.862.821.592,00 terserap 61.97 % yaitu Rp 1.773.998.364,00

b. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dengan anggaran Rp 47.863.800,00 terserap Rp 45.799.800 atau sebesar 95.68 %.

c. Penyedia Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dengan anggaran Rp 45.000.000,00 terserap 99 % yaitu Rp 44.855.275,00.

d. Penyedia Makanan dan Minuman

Kegiatan dengan anggaran Rp 12.000.000,00 mampu diserap sebesar Rp 11.945.500 atau sekitar 99,5 %.

e. Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kegiatan ini dengan pagu Rp 590.916.720,00 direalisasikan sebesar Rp 574.993.763,00 atau 97% dari anggaran yang tersedia.

f. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 9.900.000 atau sekitar 99 % dari keseluruhan pagu Rp 10.000.000,-

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 48.784.201,- atau 97% dari total pagu sebesar Rp 50.000.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini terealisasi 94.75 % yaitu sebesar Rp 28.425.000,- dari total pagu Rp 30.000.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Fasilitasi penyelesaian kepada pihak ketiga
Kegiatan ini terealisasi 100% yaitu sebesar Rp 223.717.900,-
4. Program Perencanaan Tata Ruang
 - a. Persetujuan Substansi dan kelengkapan pendukung revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara
Kegiatan ini secara fisik terealisasi diatas 50% yaitu 81,7% namun secara target keuangan hanya terealisasi sekitar 41.62 %, dikarenakan efesiensi.

2.1.3 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAIANYA, TERPENUHINYA, ATAU MELEBIHI TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam menentukan target keluaran, target keluaran yang tertera pada Dokumen perencanaan tidak disesuaikan dengan kemampuan realisasi output dilapangan, sehingga target yang tertera terlalu tinggi;
2. Kurangnya koordinasi untuk beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target.

Adapun tercapainya target kinerja ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Penyusunan target Rencana kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas;
2. Penganggaran Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas;
3. Waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan *time schedule*;
4. Kualitas dan komitmen sumber daya manusia untuk pencapaian target Program/kegiatan;
5. Motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan Pimpinan sehingga membantu optimalisasi kinerja;

6. Dukungan antar pegawai dan koordinasi yang baik sebagai sebuah tim;

2.1.4 IMPLIKASI YANG TIMBUL TERHADAP TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra maka peningkatan sertifikasi aset Pemerintah Daerah telah ditrget setiap tahunnya untuk mengalami peningkatan;
2. Kegiatan pembinaan administrasi pertanahan di desa/kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan taget, harapannya dengan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan Perbub No 36 Tahun 2013
3. Penyelesaian Sengketa pertanahan memperkecil rasio sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

No	Indikator		Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisa
		IKK	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	1.Tertib Administrasi Pertanahan	Luas Lahan bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	50,22%	8,70 %	12,80 %	29,26 %	30%	
	2. Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%	100%	100%	100%	100%	85,70%	64,29 %	98,00 %	91,89 %	100 %	

	an Daerah	Penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Rencana Detail	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/H GB	0	100%	0	0	100%	0	8,58 %	31,33 %	41,31 %	45%	
2	yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	Keberadaan Perda IMB	0	100%	0	0	100%	0	ada	ada	ada	100 %	
		Keberadaan Perda RTRW (kesesuaian pemanfaatan Tata Ruang)	100%	100%	100%	100%	100%	98,50%	ada	ada	ada	100 %	

1.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Masih rendahnya sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah;
2. Belum dimilikinya dokumen perencanaan Tata Ruang yang baik;
3. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
4. Belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing Desa/Kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;
5. Banyaknya persoalan-persolan sengketa pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terselesaikan baik yang dikuasai oleh masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga.
6. Pemetaan Program dan Kegiatan baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Adaptasi perubahan kebiasaan baru dengan adanya Pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas embantuan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

b. Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

- Sub Bagian Kepegawaian, dan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

- Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
- Seksi Pemetaan Tata Ruang

4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :

- Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah
- Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
- Seksi Data dan Informasi Pertanahan

5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :

- Seksi Penatagunaan Tanah
- Seksi Data dan Pemetaan Tematik
- Seksi Penguatan Hak Atas Tanah

6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :

- Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
- Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
- Seksi Penyuluhan Pertanahan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis.
2. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah;
3. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan.
4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
6. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;

7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa kecamatan/desa dan ex HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;
8. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berpegang pada Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat dan disepakati, yaitu Ssebagai berikut :

1. Visi
"Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"
2. Misi
 - Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
 - Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah

Dala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan Misi Ke Lima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah" , yang tujuannya untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Penyelesaian Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Meyelesaikan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah di beberapa Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Pertanahan dan penataan ruang.

a. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan sebagai perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.3 terlampir.

Tabel C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD: DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.087.857.520	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.087.857.520	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	60 Rekening	242.120.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	Jumlah Rekening yang terbayarkan	60 Rekening	242.120.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	75.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	75.000.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan	228 OB	308.248.800	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenggarong	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	228 OB	308.248.800	

RENCANA KERJA Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

		keuangan								
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	60 Jenis	120.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Tengg rong	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	50 Jenis	120.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	4 Jenis	20.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tengg rong	1.Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	4 Jenis	20.000.000	
		2. Jumlah Penggandaan	35.000 Lembar			Tengg rong	2. Jumlah Penggandaan	35.000 Lembar		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	5 Jenis	2.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tengg rong	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	- -	2.500.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	2604 Exempl ar	7.812.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tengg rong	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	2604 Exempl ar	7.812.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	1.500.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Tengg rong	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	1.500.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	120 Kotak	15.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Tengg rong	1. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	100 Kotak	15.000.000	

		2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	36 Dos	300.000.000			2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	30 Dos	300.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	12 Kali	590.676.720		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	8 kali	590.676.720	
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	660 OB	25.000.000		Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	660 OB	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2 Jasa	30.000.000		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- -	30.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan hari Besar/Nasional dan Pameran	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Event	100.000.000		Fasilitasi Kegiatan hari Besar/Nasional dan Pameran	Jumlah Pameran yang diikuti	1 Event	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	58 Unit	250.000.000		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	23 Unit	250.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	410.000.000		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	410.000.000	

	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Tengg rong	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		100.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 Gedung	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tengg rong	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1,00 Gedung	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Tengg rong	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	100.000.000	
		2. Pembelian BBM (jumlah liter)	4000 liter			Tengg rong	2. Pembelian BBM (jumlah liter)	2.000 Liter		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	20 unit	40.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tengg rong	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	10 Unit	40.000.000	
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebeleur yang tersedia	135 unit	100.000.000	Pengadaan Meubelair	Tengg rong	Jumlah Mebeleur yang tersedia	135 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik dan telepon	Jumlah pemeliharaan jaringan, instalasi air, listrik dan telepon yang dipelihara	1 Paket	70.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik dan telepon	Tengg rong	Jumlah pemeliharaan jaringan, instalasi air, listrik dan telepon yang dipelihara	1 Paket	70.000.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	100 %	106.400.000	Program peningkatan disiplin aparatur		Program peningkatan disiplin aparatur	100 %	106.400.000	

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	156	Stell	106.400.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tengg rong	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	156	Stell	106.400.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	170.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	170.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Persentase pelaksanaan bimbingan.pendidikan/pelatihan yang dilakukan	10	Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Tengg rong	Persentase pelaksanaan bimbingan.pendidikan /pelatihan yang dilakukan	10	Orang	150.000.000	
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	8	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Tengg rong	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	9	Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah					Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Tengg rong	Jumlah Inovasi	1	Inovasi		

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)	70	Nilai LKJiP	384.248.800	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70	Nilai LKJiP	384.248.800	
	Penyusunan buku profile SKPD	Jumlah buku profil yang diterbitkan	1	Dokumen	25.000.000		Tengg rong	Jumlah buku profil	1	Dokumen	25.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	9	Dokumen	52.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Tengg rong	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	9	Dokumen	52.000.000,00	
	Penyusunan Data dan Informasi	Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang	4	Bidang	24.000.000	Penyusunan Data dan Informasi	Tengg rong	Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang	4	Bidang	24.000.000	

	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah		2 C	La po ra n	276.947.200,0 0	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah			20	La po ra n	276.947.200, 00	
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		2	La po ra n	31.301.599,76	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			2	La po ra n	31.301.599,7 6	
	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Tertib administrasi penguasaan tanah	50	%	14.250.000.000	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	50	%	14.250.000.000	
	Pembinaan,pen gendalian Administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan dan Kelurahan/Desa	1. Jumlah desa/kelurahan/ kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi 2. Jumlah Monitoring/Evalu asi yang dilakukan	18	Kecam atan	350.000.000	Pembinaan,pengenda lian Administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan dan Kelurahan/Desa	18 Kecam atan	1. Jumlah desa/kelurahan/keca matan yang dilakukan pembinaan administrasi 2. Jumlah Monitoring/Evaluasi yang dilakukan	18,00	Kecam atan	350.000.000	PRIORITA S

	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	Persentase Tersedianya Database Pertanahan	10 %	200.000.000	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	Tenggara, Muara Wis, Anggana	Persentase Tersedianya Database Pertanahan	100,00 %	200.000.000	PRIORITAS
--	---	--	------	-------------	---	------------------------------	--	----------	-------------	-----------

		3. Persentase Luas Lahan Bersertifikat	75 %				3. Persentase Luas Lahan Bersertifikat			
	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum			10.000.000.000					10.000.000.000	
	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Jumlah Persil	480 Persil	3.000.000.000	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	18 Kecamatan	Jumlah Persil	500 Persil	3.000.000.000	PRIORITAS
	Peningkatan Legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Persil	320 Persil	350.000.000	Peningkatan Legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	Jumlah Persil	- -	350.000.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah kecamatan	3 Kecamatan	150.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Sebulu, kota bangun, muara badak	Jumlah kecamatan	3 Kecamatan	150.000.000	

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	5 Peta	200.000.000	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	5 Peta	200.000.000	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi	90 %	1.450.000.000	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan		Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	90 %	1.450.000.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah permohonan kasus/sengketa	13 Kasus	350.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah permohonan kasus/sengketa	13 Kasus	350.000.000	PRIORITAS
	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah penyuluhan/Penyampaian informasi hukum pertanahan	18 Penyuluhan	400.000.000	Penyuluhan Hukum Pertanahan	18 Kecamatan	Jumlah penyuluhan/Penyampaian informasi hukum pertanahan	18 Penyuluhan	400.000.000	
	Deteksi Dini Sengketa Pertanahan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan	18 Kali	400.000.000	Deteksi Dini Sengketa Pertanahan	18 Kecamatan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan	18 Kali	400.000.000	
	Penyusunan materi dampak sosial ekonomi atas penggunaan tanah di areal perkebunan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan materi dampak sosial ekonomi atas penggunaan tanah di areal perkebunan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	1 Dokumen	300.000.000	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Detail yang telah	100 %	1.000.000.000	Program Perencanaan Tata Ruang		Program Perencanaan Tata Ruang	100 %	1.000.000.000	

RENCANA KERJA Tahun 2021

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

		ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah								
	Persetujuan Substansi dan kelengkapan pendukung revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1.Jumlah Dokumen Materi Teknis 2.Jumlah Dokumen KLHS 3.Jumlah Dokumen RDTR	4	Dokumen	300.000.000	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan	Tabang, Kenohan, Kemba ng Janggu t	1.Jumlah Dokumen Materi Teknis 2.Jumlah Dokumen KLHS 3.Jumlah Dokumen RDTR	-	300.000.000
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi	20	Kali	300.000.000	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi	15	300.000.000
	Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	14	Kali	400.000.000	Pendampingan Legislasi RDTR	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	10	400.000.000
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RTRW/RDTR	50	%	300.000.000	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang		Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RTRW/RDTR		300.000.000

	Update Tata Guna Lahan	1. Dokumen Updating Tata Guna Lahan 2. Jumlah Peta Pemanfaatan Ruang	50	Peta	300.000.000	Update Tata Guna Lahan	Kab.Kutai Kartanegara	1. Dokumen Updating Tata Guna Lahan 2. Jumlah Peta Pemanfaatan Ruang	-	-	300.000.000	
--	------------------------	---	----	------	-------------	------------------------	-----------------------	---	---	---	-------------	--

3.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel 2.5 usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2021, terlampir

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				
	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pasar Kecamatan Kembang Janggut	Desa Kembang Janggut	Jumlah Lahan yang dibebaskan	1 Hektar	Disetujui di Tahun 2021

RENCANA KERJA Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

BAB III

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG**

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telahaan terhadap kebijakan nasional merupakan penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, ketahanan pangan, iklim usaha dan investasi. Lingkungan hiduo, hukum dan keamanan Provinsi yang terkait dengan pembangunan Kabupaten.

Kebijakan yang dibuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan tindak lanjut kebijakan Kabupaten Kutai kartanegara dalam pengaturan dan pengelolaan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	Nasional		
	PENATAAN RUANG		
1	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	
2	Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang		
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang		
4	Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataaan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur		
	PERTANAHAN		
1	Membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	
2	Reforma agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan Pemberdayaan masyarakat		

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
3	Pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum		
4	Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan		
B	PROVINSI		
	PENATAAN RUANG		
1	Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batu bara yang bernilai tambah tinggi dan brwawasan lingkungan menjadi sektir unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat	Perda tentang Perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036	
2	Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi yang wilayah dan nasional		
3	Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau		
4	Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan meberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi		
5	Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelstarian lingkungan serta menungang aspek politik, Pertahanan dan keamanan		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan, perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang handal di bidang pertanahan dan penataan ruang. Untuk itu disusun Visi dan Misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang akan dicapai melalui tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan pendukung. Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun yang menjadi Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun beberapa misi, antara lain :

1. Memantapkan reformasi Birokrasi untuk Rakyat;
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

Adapun tujuan dan sasaran secara umum yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam RENSTRA Dinas adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Pembangunan;
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan;
3. Meningkatkan Pelayanan Penataan Ruang.

Sasaran :

1. Meningkatkan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Meningkatnya penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan;
3. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan PD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 sebagaimana yang pada tabel di bawah ini berikut dengan perkiraan maju tahun 2021 sebagai berikut :

5. Tabel C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah layanan yang seharusnya x 100 %		100 Persen	2.059.296.720	APBD		100 Persen	2.059.296.720
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan dibagi jumlah rekening yang ada x 100%	Tenggarong	60 Rekening	242.120.000	APBD		60 Rekening	242.120.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operaional	Jumlah kendaraan dinas operaisional yang terfasilitasi pemeliharaan dibagi jumlah kendaraan dinas yang tercantum dalam KIB x 100%	Tenggarong	6 Unit	75.000.000	APBD		10 Unit	75.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Jumlah ATK yang tersedia dibagi total kebutuhan Atk dalam 1 tahun x 100%	Tenggarong	50 Jenis	120.000.000	APBD		60 Jenis	120.000.000

RENCANA KERJA Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak yang Tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam 1 tahun x 100%	Tenggarong	4	Jenis	20.000.000	APBD		4	Jenis	20.000.000
		2. Jumlah Penggandaan	Jumlah penggandaan yang terbayarkan dibagi total penggandaan x 100%	Tenggarong	35.000	Lembar				35.000	Lembar	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam 1 tahun x 100%	Tenggarong	3000	Exemplar	50.000.000	APBD		2604	Exemplar	50.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan bahan logistik dalam 1 tahun x 100 %	Tenggarong	5	Jenis	1.500.000	APBD		5	Jenis	1.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan dalam 1` tahun x 100%	Tenggarong	200	Kotak	200.000.000	APBD		120	Kotak	200.000.000
		2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	Jumlah makan minum tamu yang tersedia dibagi jumlah makan minuman yang harusnya tersedia dikali 100%	Tenggarong	200	Dos				36	Dos	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan x 100%	Tenggarong	30 kali	450.000.000	APBD		12 kali	450.000.000
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	Jumlah tenaga honorer yang terbayarkan dibagi jumlah tenaga honorer yang tersedia x 100%	Tenggarong	660 OB	590.676.720	APBD		660 OB	590.676.720
	Fasilitasi Kegiatan hari Besar/Nasional dan Pameran	Jumlah Pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Tenggarong	2 Event	60.000.000	APBD		2 Event	60.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan x 100%	Tenggarong	23 Unit	250.000.000	APBD		35 Unit	250.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana kantor yang ada x 100%		100 %	460.000.000	APBD		100 %	460.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Jumlah luasan Gedung yang direhab dibagi jumlah luasan kantor x 100%	Tenggarong	1,00 Gedung		APBD			

	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pembelian BBM (jumlah liter)	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh kendaraan dinas yang tercatat di KIB x 100%	Tenggarong Tenggarong	6 2.500	Unit Liter	250.000.000	APBD APBD	10 4000	Unit Liter	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung yang tercatat di KIB dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh peralatan gedung yang tercantum di KIB x 100%	Tenggarong	10	Unit	40.000.000	APBD	20	Unit	40.000.000
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Jumlah Mebeleur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan mebeleur yang dibuthkan x 100 %	Tenggarong	135	unit	100.000.000	APBD	40	unit	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik dan telepon	Jumlah pemeliharaan jaringan, instalasi listrik yang dipelihara		Tenggarong	1	Paket	70.000.000	APBD	1	Paket	70.000.000
	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata Capaian Nilai SKP ASN dibagi jumlah ASN x 100%		100	%	160.000.000	APBD	100	%	160.000.000
	Pengadaan PDH Pakaian Khas Daerah/Miskat	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia dibagi jumlah pegawai x 100%	Tenggarong	130	Stell	160.000.000	APBD	130	Stell	160.000.000

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya x 100%		100 %	245.000.000	APBD		100 %	245.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Persentase pelaksanaan bimbingan.pendidikan /pelatihan yang dilakukan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan/pendidikan/p elatihan dibagi jumlah ASN yang dijadwalkan untuk melakukan bimbingan/pendidikan/p elatihan	Tenggarong	10 Orang	150.000.000	APBD		10 Orang	150.000.000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat waktu x 100%	Tenggarong	9 Dokumen	20.000.000	APBD		8 Dokumen	20.000.000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi		Tenggarong	1 Inovasi	75.000.000	APBD	Kegiatan Tambahan /usulan tim bekias	1 Inovasi	75.000.000

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)	Nilai LKJiP (hasil pemeriksaan inspektorat)		70	Nilai LKJiP	384.248.800	APBD		70	Nilai LKJiP	384.248.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%	Tenggarong	9	Dokumen	52.000.000,00	APBD		9	Dokumen	52.000.000,00
	Penyusunan Data dan Informasi	Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang	Jumlah jenis informasi yang di update di website dibagi jumlah jenis informasi yang seharusnya di update x 100%	Tenggarong	4	Bidang	24.000.000	APBD		4	Bidang	24.000.000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%	Tenggarong	20	Laporan	276.947.200,00	APBD		20	Laporan	276.947.200,00
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%	Tenggarong	2	Laporan	31.301.599,76	APBD		2	Laporan	31.301.599,76

TOTAL PAGU GENERIK						3.308.545.520				3.308.545.520
	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Tertib administrasi penguasaan tanah	Indeks Kepuasan Desa/Kelurahan/Kecamatan tentang pelayanan SKPT oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		50 %	13.900.000.000	APBD		80 %	13.900.000.000
	Pembinaan, pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan dan Kelurahan/Desa	1. Jumlah desa/kelurahan/kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi 2. Jumlah Monitoring/Evaluasi yang dilakukan	Jumlah akumulasi desa/kelurahan/kecamatan terlayani dibagi jumlah desa/kelurahan/kecamatan di Kab.Kukar X 100%	18 Kecamatan	18 Kecamatan	350.000.000	APBD	PRIORITAS	18 Kecamatan	350.000.000
	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	Persentase Tersedianya Database Pertanahan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan di Kab.Kukar x 100%	Tenggarong, Muara Wis, Anggana	12 %	200.000.000	APBD	PRIORITAS	18,5 %	200.000.000

		2. persenta se penyelesaian pengada an tanah bagi kepeantin gan umum	Jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang masuk x 100%		-	-		APBD				
	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah Luas Lahan yang dibebaskan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan dibagi jumlah permohonan luas lahan yang masuk untuk dibebaskan x 100 %	Kab.Kutai Kartanegara	10	Pembebas an Lahan	10.000.000.000	APBD		10	Pembebas an Lahan	10.000.000.000
		3. Persenta se Luas Lahan Bersertif ikat	Jumlah luas Lahan Pemda yang bersertifikat dibagi luas lahan pemda yang seharusnya bersertifikat x 100 %		85	%		APBD				
	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Jumlah Persil	Jumlah Persil Tanah yang diselesaikan dibagi jumlah Persil yang ditindak lanjuti sampai proses sertifikat x 100 %	18 Kecamatan	480	Persil	3.000.000.000	APBD	PRIORITAS	480	Persil	3.000.000.000

	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah kecamatan	Jumlah kecamatan yang selesai terfasilitasi dibagi jumlah kecamatan yang terdaftar dalam kawasan hutan x 100 %	Sebulu, kota bangun, muara badak	3 Kecamatan	150.000.000	APBD		3 Kecamatan	150.000.000
	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	5 Peta	200.000.000	APBD		6 Peta	200.000.000
	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi dibagi jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan dikali 100 %		90 %	1.750.000.000	APBD		90 %	1.750.000.000
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah permohonan kasus/sengketa	Jumlah kasus yang difasilitasi dibagi jumlah permohonan kasus x 100%	Kab.Kutai Kartanegara	13 Kasus	350.000.000	APBD	PRIORITAS	13 Kasus	350.000.000
	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah penyuluhan/penyampaian informasi hukum pertanahan	Jumlah penyuluhan/penyampaian informasi pertanahan yang dilakukan dibagi jumlah penyuluhan/penyampaian informasi hukum pertanahan	18 Kecamatan	18 Penyuluhan	400.000.000	APBD		18 Penyuluhan	400.000.000

RENCANA KERJA Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

	Deteksi Dini Sengketa Pertanahan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan dibagi Jumlah Pendampingan/Supervisi	18 Kecamatan	18 kali	400.000.000	APBD		18 kali	400.000.000
	Penyusunan materi dampak sosial ekonomi atas penggunaan tanah di areal perkebunan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
	Penyusunan Materi Teknis Peraturan Daerah Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan	Jumlah RDTR yang disusun/diterbitkan berdasarkan Permen PU dibagi jumlah RDTR yang seharusnya diterbitkan seluruhnya x 100%		100 %	1.400.000.000	APBD		100 %	1.400.000.000

		n daerah								
	Persetujuan Substansi dan kelengkapan pendukung revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1.Jumlah Dokumen Materi Teknis 2.Jumlah Dokumen KLHS 3.Jumlah Dokumen RDTR	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	300.000.000	APBD		4 Dokumen	300.000.000
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	Kab.Kutai Kartanegara	15 Kali	300.000.000	APBD		20 Kali	300.000.000
	Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RTDR yang dilakukan	Kab.Kutai Kartanegara	10 Kali	400.000.000	APBD	PRIORITAS	4 Kali	400.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	400.000.000	APBD		1 Dokumen	400.000.000

	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RTRW/RDTR	Jumlah kecamatan yang memanfaatkan RTRW/RDTR dibagi jumlah Kecamatan x 100%		40 %	650.000.000	APBD		40 %	650.000.000
	Update Tata Guna Lahan	1. Dokumen Updating Tata Guna Lahan 2. Jumlah Peta Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah Dokumen yang disusun 2. Jumlah Peta pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	18 Kecamatan	40 Pertek	300.000.000	APBD		50 Pertek	300.000.000
	Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang	Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Pertimbangan teknis	Kab.Kutai Kartanegara	5,00 Dokumen	350.000.000	APBD		5,00 Dokumen	350.000.000
TOTAL PAGU KEGIATAN/BIDANG						17.700.000.000				17.700.000.000
TOTAL PAGU KESELURUHAN						21.008.545.520				21.008.545.520

RENCANA KERJA Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Pertanahan dan Pantaan Ruang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 mengacu kepada Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegaitan tahun sebelumnya, memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang diemban oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai salah satu OPD di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen ini.

Ditetapkan di : Tenggarong

Tanggal : Maret 2020

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang


SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19671027 199403 1 008

RENCANA KERJA Tahun 2021
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

TABEL 3.2
RENCANA KERJA TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

OPD : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

5. Tabel C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Adminstrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah layanan yang seharusnya x 100 %		100 Persen	2,059,296,720	APBD		100 Persen	2,059,296,720
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan dibagi jumlah rekening yang ada x 100%	Tenggarong	60 Rekening	242,120,000	APBD		60 Rekening	242,120,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operaional	Jumlah kendaraan dinas operaisional yang terfasilitasi pemeliharaan dibagi jumlah kendaraan dinas yang tercantum dalam KIB x 100%	Tenggarong	6 Unit	75,000,000	APBD		10 Unit	75,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Jumlah ATK yang tersedia dibagi total kebutuhan Atk dalam 1 tahun x 100%	Tenggarong	50 Jenis	120,000,000	APBD		60 Jenis	120,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam 1 tahun x 100%	Tenggarong	4 Jenis	20,000,000	APBD		4 Jenis	20,000,000
		2. Jumlah Penggandaan	Jumlah penggandaan yang terbayarkan dibagi total penggandaan x 100%	Tenggarong	35,000 Lembar		APBD		35,000 Lembar	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam 1 tahun x 100%	Tenggarong	3000 Exemplar	50,000,000	APBD		2604 Exemplar	50,000,000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan bahan logistik dalam 1 tahun x 100 %	Tenggarong	5 Jenis	1,500,000	APBD		5 Jenis	1,500,000
	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan dalam 1` tahun x 100%	Tenggarong	200 Kotak	200 000 000	APBD		120 Kotak	200 000 000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan makanan dan minuman	2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	Jumlah makan minum tamu yang tersedia dibagi jumlah makan minuman yang harusnya tersedia dikali 100%	Tenggarong	200 Dos	200,000,000	APBD		36 Dos	200,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan x 100%	Tenggarong	30 kali	450,000,000	APBD		12 kali	450,000,000
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer	Jumlah tenaga honorer yang terbayarkan dibagi jumlah tenaga honorer yang tersedia x 100%	Tenggarong	660 OB	590,676,720	APBD		660 OB	590,676,720
	Fasilitasi Kegiatan hari Besar/Nasional dan Pameran	Jumlah Pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Tenggarong	2 Event	60,000,000	APBD		2 Event	60,000,000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan x 100%	Tenggarong	23 Unit	250,000,000	APBD		35 Unit	250,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana kantor yang ada x 100%		100 %	460,000,000	APBD		100 %	460,000,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Jumlah luasan Gedung yang direhab dibagi jumlah luasan kantor x 100%	Tenggarong	1.00 Gedung		APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh kendaraan dinas yang tercatat di KIB x 100%	Tenggarong	6 Unit	250,000,000	APBD		10 Unit	250,000,000
		2. Pembelian BBM (jumlah liter)		Tenggarong	2,500 Liter		APBD		4000 Liter	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung yang tercatat di KIB dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh peralatan gedung yang tercantum di KIB x 100%	Tenggarong	10 Unit	40,000,000	APBD		20 Unit	40,000,000
	Pengadaa Meubelair	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Jumlah Mebeleur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan mebeleur yang dibuthkan x 100 %	Tenggarong	135 unit	100,000,000	APBD		40 unit	100,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan, instalasi listrik dan telepon	Jumlah pemeliharaan jaringan, instalasi listrik yang dipelihara		Tenggarong	1 Paket	70,000,000	APBD		1 Paket	70,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata Capaian Nilai SKP ASN dibagi jumlah ASN x 100%		100 %	160,000,000	APBD		100 %	160,000,000
	Pengadaan PDH Pakaian Khas Daerah/Miskat	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia dibagi jumlah pegawai x 100%	Tenggarong	130 Stell	160,000,000	APBD		130 Stell	160,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya x 100%		100 %	245,000,000	APBD		100 %	245,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Persentase pelaksanaan bimbingan.pendidikan/pelatihan yang dilakukan	Jumlah peserta/ASN yang mengikuti bimbingan/pendidikan/pelatihan dibagi jumlah ASN yang dijadwalkan untuk melakukan bimbingan/pendidikan/pelatihan	Tenggarong	10 Orang	150,000,000	APBD		10 Orang	150,000,000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat waktu x 100%	Tenggarong	9 Dokumen	20,000,000	APBD		8 Dokumen	20,000,000
	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi		Tenggarong	1 Inovasi	75,000,000	APBD	Kegiatan Tambahan /usulan tim bekias	1 Inovasi	75,000,000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKjiP (hasil pemeriksaan inspektorat)	Nilai LKjiP (hasil pemeriksaan inspektorat)		70 Nilai LKjiP	384,248,800	APBD		70 Nilai LKjiP	384,248,800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%	Tenggarong	9 Dokumen	52,000,000.00	APBD		9 Dokumen	52,000,000.00
	Penyusunan Data dan Informasi	Tersediaanya media informasi perencanaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang	Jumlah jenis informasi yang di update di website dibagi jumlah jenis informasi yang seharusnya di update x 100%	Tenggarong	4 Bidang	24,000,000	APBD		4 Bidang	24,000,000
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	JumlahLaporan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%	Tenggarong	20 Laporan	276,947,200.00	APBD		20 Laporan	276,947,200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dibagi jumlah dokumen yang seharusnya dihasilkan x 100%	Tenggarong	2Laporan	31,301,599.76	APBD		2Laporan	31,301,599.76
TOTAL PAGU GENERIK						3,308,545,520				3,308,545,520
	Program Penataan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Tertib administrasi penguasaan tanah	Indeks Kepuasan Desa/Kelurahan/Kecamatan tentang pelayanan SKPT oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		50%	13,900,000,000	APBD		80%	13,900,000,000
	Pembinaan, pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di kecamatan dan Kelurahan/Desa	1. Jumlah desa/kelurahan/kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi 2. Jumlah Monitoring/Evaluasi yang dilakukan	Jumlah akumulasi desa/kelurahan/kecamatan terlayani dibagi jumlah desa/kelurahan/kecamatan di Kab.Kukar X 100%	18 Kecamatan	18Kecamatan	350,000,000	APBD	PRIORITAS	18Kecamatan	350,000,000
	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	Persentase Tersedianya Database Pertanahan	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan di Kab.Kukar x 100%	Tenggarong, Muara Wis, Anggana	12%	200,000,000	APBD	PRIORITAS	18.5%	200,000,000
		2. persentase penyelesaian pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan pembebasan/pengadaan tanah yang masuk x 100%		-	-	APBD			
	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah Luas Lahan yang dibebaskan	Jumlah luas lahan yang dibebaskan dibagi jumlah permohonan luas lahan yang masuk untuk dibebaskan x 100 %	Kab.Kutai Kartanegara	10Pembebasan Lahan	10,000,000,000	APBD		10Pembebasan Lahan	10,000,000,000
		3. Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Jumlah luas Lahan Pemda yang bersertifikat dibagi luas lahan pemda yang seharusnya bersertifikat x 100 %		85%		APBD			
	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Jumlah Persil	Jumlah Persil Tanah yang diselesaikan dibagi jumlah Persil yang ditindak lanjuti sampai proses sertifikat x 100 %	18 Kecamatan	480Persil	3,000,000,000	APBD	PRIORITAS	480Persil	3,000,000,000
	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Jumlah kecamatan	Jumlah kecamatan yang selesai terfasilitasi dibagi jumlah kecamatan yang terdaftar dalam kawasan hutan x 100 %	Sebulu, kota bangun, muara badak	3Kecamatan	150,000,000	APBD		3Kecamatan	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	5 Peta	200,000,000	APBD		6 Peta	200,000,000
	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi dibagi jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan dikali 100 %		90 %	1,750,000,000	APBD		90 %	1,750,000,000
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah permohonan kasus/sengketa	Jumlah kasus yang difasilitasi dibagi jumlah permohona kasus x 100%	Kab.Kutai Kartanegara	13 Kasus	350,000,000	APBD	PRIORITAS	13 Kasus	350,000,000
	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah penyuluhan/Penyampaian informasi hukum pertanahan	Jumlah penyuluhan/penyampaian informasi pertanahan yang dilakukan dibagi jumlah penyuluhan/penyampaian informasi hukum pertanahan	18 Kecamatan	18 Penyuluhan	400,000,000	APBD		18 Penyuluhan	400,000,000
	Deteksi Dini Sengketa Pertanahan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan dibagi Jumlah Pendampingan/Supervisi	18 Kecamatan	18 kali	400,000,000	APBD		18 kali	400,000,000
	Penyusunan materi dampak sosial ekonomi atas penggunaan tanah di areal perkebunan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
	Penyusunan Materi Teknis Peraturan Daerah Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang disusun	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah	Jumlah RDTR yang disusun/diterbitkan berdasarkan Permen PU dibagi jumlah RDTR yang seharusnya diterbitkan seluruhnya x 100%		100 %	1,400,000,000	APBD		100 %	1,400,000,000
	Persetujuan Substansi dan kelengkapan pendukung revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1.Jumlah Dokumen Materi Teknis 2.Jumlah Dokumen KLHS 3.Jumlah Dokumen RDTR	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	300,000,000	APBD		4 Dokumen	300,000,000
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	Kab.Kutai Kartanegara	15 Kali	300,000,000	APBD		20 Kali	300,000,000
	Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RTDR yang dilakukan	Kab.Kutai Kartanegara	10 Kali	400,000,000	APBD	PRIORITAS	4 Kali	400,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	400,000,000	APBD		1 Dokumen	400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Cara Hitung	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Kecamatan yang Memanfaatkan RTRW/RDTR	Jumlah kecamatan yang memanfaatkan RTRW/RDTR dibagi jumlah Kecamatan x 100%		40 %	650,000,000	APBD		40 %	650,000,000
	Update Tata Guna Lahan	1. Dokumen Updating Tata Guna Lahan 2. Jumlah Peta Pemanfaatan Ruang	1.Jumlah Dokumen yang disusun 2. Jumlah Peta pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	18 Kecamatan	40 Pertek	300,000,000	APBD		50 Pertek	300,000,000
	Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang	Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Pertimbangan teknis	Kab.Kutai Kartanegara	Dokumen 5.00	350,000,000	APBD		5.00 Dokumen	350,000,000
TOTAL PAGU KEGIATAN/BIDANG						17,700,000,000				17,700,000,000
TOTAL PAGU KESELURUHAN						21,008,545,520				21,008,545,520

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program			
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9	
URUSAN : NON URUSAN (GENERIK)													
0000.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit											
0000.06.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP
					01	2.01	01			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			
					01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			
					01	2.01	03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			
					01	2.01	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			
					01	2.01	05			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
0000.06.033	Penyusunan data dan informasi	Jumlah Informasi Yang Tersedia											

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan			Kegiatan		Program						
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9		
0000.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Administrasi Keuangan	2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Administrasi Keuangan	2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran												

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9		
0000.01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	x	xx	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10			
0000.01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jasa perkantoran ATK yang disediakan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	9
0000.01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah cetakan 2. Jumlah penggandaan	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	x	xx	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10			
0000.01.009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01.010	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	x	xx	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01.011	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah makanan dan minuman 2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Jumlah makanan dan minuman 2. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Tersedia	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang														
RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019											Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9		
0000.01.012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	Akan diusulkan Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0000.01.013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer												Diusulkan menjadi sub kegiatan Penyediaan Gaji Non
0000.01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja												
0000.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	1. Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Arsip 2. Jumlah Dokumen Arsip												Diusulkan apabila dilaksanakan setiap OPD
0000.01.040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Jumlah Perlengkapan Kegiatan												
0000.01.043	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	x	xx	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.01.046	Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran	1. Jumlah Hari Besar Nasional/Pameran yang Dikuti												
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik												

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9		
0000.02.002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. Jumlah kendaraan operasional 2. Pembelian BBM	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jumlah kendaraan operasional 2. Pembelian BBM	Administrasi Umum	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tepelihara	X	XX	01	2.03	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan				Kegiatan		Program					
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode		Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	9	
0000.02.007	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	x	xx	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.02.016	Pengadaan meubelair	Jumlah Mebeleuir yang tersedia	x	xx	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubelair	Administrasi Umum	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	
0000.02.054	Pemeliharaan rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan telpon	Jumlah Pemeliharaan Jaringan, Instalasi Air, Listrik dan Telepon yang dipelihara												
0000.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN												
0000.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	x	xx	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP	

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang															
RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019												Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program					
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9			
0000.03.001	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu dan atributnya	x	xx	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP		
0000.03.007	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Jumlah Kartu Identitas yang dibuat													
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata- rata nilai SKP													
0000.05.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Peserta/ASN yang mengikuti Bimbingan/Pendidikan/ Pelatihan	x	xx	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat pendidikan dan pelatihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN 7) Rata- rata nilai SKP		
0000.05.003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi												Diusulkan apabila dilaksanakan setiap	
0000.05.024	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Jumlah Laporan/Dokumen kepegawaian yang dihasilkan													
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun menjadi peraturan daerah													

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program			
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode				Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	9
0103.42.001	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi Perda RTRW Kabupaten	Jumlah revisi Perda RTRW Kab.Kutai Kartanegara	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan substansi, evaluasi, konsultansi evaluasi RTRW yang ditetapkan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah RTRW dan RRTR yang ditetapkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
0103.42.002	Penyusunan Materi Teknis RDTR Kec.Loa Kulu	Jumlah Dokumen Materi Teknis RDTR Loa Kulu	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan substansi, evaluasi, konsultansi evaluasi RRRW yang ditetapkan				
0103.42.006	Pendampingan Legislasi RDTR	Jumlah Pendampingan Legislasi RDTR	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan substansi, evaluasi, konsultansi evaluasi RRRW yang ditetapkan				
			1	3	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang					
			1	3	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota					
0103.44.003	Kajian Pemukiman Diatas Air Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen KLHS dan Jumlah Dokumen RDTR	1	3	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi	Sistem Informasi Penataan Ruang			
0103.44.006	Pendampingan Proses Penyusunan Perda Instrumen Pengendalian Sekitar PSN Jalan	Jumlah Dokumen Perda Instrumen	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang ditetapkan				
0103.42.003	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah	Jumlah dokumen KLHS dan dokumen RDTR	1	3	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan				
0103.42.007	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen	1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota	Jumlah Pertemuan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah Pertemuan		

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program			
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode				Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	9
			1	3	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					
0103.44.005	Pendampingan Penyusunan RDTR Pengendalian Pemanfaatan Ruang di	Jumlah Dokumen (Perda)	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota					
0103.44.002	Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk utilitas terpadu kota	Dokumen Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang											
0103.42.004	Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Kab.Kutai	Jumlah Dokumen Garis Sempadan Jalan dan Sempadan Bangunan	1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah partisipasi masyarakat				
0103.42.005	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kutai	Jumlah Fasilitasi	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah Pertemuan		
			1	3	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang					
			1	3	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang					
			1	3	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang					
			1	3	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang					
0103.44.001	Fasilitasi dan Identifikasi Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Ruang	Jumlah Pertimbangan teknis yang dikeluarkan	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah Pertemuan		
			1	3	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					
			1	3	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang				
			1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pertemuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah Pertemuan		

RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program			
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9	
			1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Pertemuan				
			1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS bidang Penataan Ruang				
0103.44.004	Update Tata Guna Lahan	Jumlah Dokumen Updating Tata Guna Lahan	1	3	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi	Sistem Informasi Penataan Ruang			
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
			2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah pertemuan	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	
											PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Tidak ada kewenangan	
0204.17.004	Deteksi Dini Sengketa Pertanahan	Jumlah Pendampingan/Supervisi dan deteksi dini yang dilakukan	2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan dalam daerah yang diselesaikan.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
0204.16.005	Fasilitasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan	Jumlah Kecamatan	2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah pertemuan				
0204.17.002	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Jumlah permohonan kasus/sengketa	2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.					
0204.17.003	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah penyuluhan/Penyampaian informasi hukum pertanahan	2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.					
0204.16.001	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kukar	Jumlah Persil	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang												
RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019									Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan			Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode			Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenklatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	9
0204.16.003	Fasilitasi Sertifikasi Aset Perumahan	Jumlah Persil	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota				
			2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luas tanah ulayat yang ditetapkan.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
			2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan			
			2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan tanah ulayat yang ditetapkan.			
			2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pertemuan	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah penyelesaian masalah tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
			2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah survey	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah luasan tanah kosong	
			2	10	08	2.02	02	Pemanfataan Tanah Kosong	Jumlah luasan pemanfaatan tanah kosong.			
			2	10	09	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah pertemuan			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
0204.17.006	Penyusunan Materi Teknis Peraturan Daerah Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Materi Teknis Yang Disusun	2	10	09	2.02	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah luasan pemanfaatan tanah negara			
0204.16.004	Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah luas lahan yang dibebaskan	2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah pertemuan			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
0204.16.006	Penyusunan dan Updating Database Pertanahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	2	10	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah survey			

RKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang													
RKPD 2021			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan				Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode				Nomenklatur	Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	9
0204.16.008	Pembinaan, Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan dan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan administrasi pertanahan	2	10	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah survey				
0204.17.005	Penyusunan Materi Teknis dan Perda Dampak Sosial Ekonomi Atas Penggunaan Tanah diAreal Perkebunan	Jumlah Materi Teknis dan Perda yang Disusun	2	10	010	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					
0204.17.006	Penyusunan Materi Teknis Peraturan Daerah Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Materi Teknis Yang disusun	2	10	010	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					
0204.16.007	Pengolahan Peta Tata Guna Tanah	Jumlah Peta Tata Guna Tanah Desa yang tersedia	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
			2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan				

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Betianto Nugroho Ali, S.H., M.H.
NIP. 19671027 199403 1